

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar. Dalam penelitian ini sample merupakan wajib pajak orang pribadi yang telah mempunyai NPWP karena NPWP menandakan bahwa subjek pajak telah memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang bersifat baru dan asli. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi beberapa item pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini penyebaran kuesioner dilakukakn secara langsung kepada responden tanpa memanfaatkan website.

1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 200 kuesioner. Dari keseluruhan kuesioner yang telah disebar oleh peneliti, jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 195 kuesioner (97,5%). Tingginya tingkat pengembalian kuesioner tidak terlepas dari proses penyebaran kuesioner yang langsung kepada responden yang melakukan melaporkan dan

membayarkan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. Jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 175 kuesioner (89,7%) dari jumlah kuesioner yang kembali, sedangkan untuk kuesioner yang tidak dapat digunakan sebagai data penelitian sebanyak 20 kuesioner (10,3%) dari jumlah kuesioner yang kembali.

Tabel 4.1
Hasil Penyebaran Kuesioner

	Offline	Persentase
Kuesioner yang disebar	200	100%
Kuesioner kembali	195	97,5%
Kuesioner dapat diolah	175	89,7%
Kuesioner tidak dapat diolah	20	10,3%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

2. Demografi Responden

Dalam penelitian ini terdapat empat (4) karakteristik responden yang digunakan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi responden dalam kuesioner penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan.

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diperhatikan pada Tabel 4.2. Berdasarkan jenis kelamin, responden dibagi menjadi 2 yaitu responden laki-laki dan perempuan. Terdapat 118 responden laki-laki dengan persentase sebesar 67,4% dari keseluruhan jumlah sampel dan 57 orang responden berjenis kelamin

perempuan dengan persentase sebesar 32,6% dari keseluruhan jumlah responden dalam penelitian.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah responden	Persentase (%)
1.	Laki-laki	118	67,4%
2.	Perempuan	57	32,6%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

b. Berdasarkan usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.3. Berdasarkan usia, responden dibagi menjadi 3 yaitu responden yang berusia 20-24 tahun, 25-35 tahun, dan usia di atas 35 tahun. Tidak terdapat responden yang berusia 20-24 tahun. Jumlah responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase sebesar 9,7% dari total keseluruhan responden, sedangkan untuk usia di atas 35 tahun terdapat sebanyak 158 orang responden dengan persentase sebesar 90,3% dari jumlah keseluruhan responden penelitian.

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	20-24	0	0
2.	25-35	17	9,7%
3.	>35	158	90,3%

Sumber: Data primer responden diolah, 2019

c. Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	D3	11	6%
2	S1	68	39%
3	S2	0	0
4	S3	0	0
5	DII (SMA)	96	55%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan pendidikan, responden diklasifikasikan kedalam 5 tingkatan pendidikan yaitu D3, S1, S2, S3, dll (SMA). Jumlah responden yang berada pada tingkat pendidikan D3 terdapat 11 orang responden dengan persentase sebesar 6% dari total jumlah responden. Jumlah responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 68 orang responden dengan persentase sebesar 39% dari keseluruhan responden. Sebanyak 96 orang responden lainnya berada pada tingkat pendidikan lainnya (SMA) dengan persentase sebesar 55% dari jumlah total responden penelitian. Sedangkan untuk tingkat pendidikan S1 dan S3 berjumlah 0 responden.

d. Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden yang diklasifikasikan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Wiraswasta	92	52,6%
2	Pegawai Swasta	47	26,8%
3	Pegawai Negeri	36	20,6%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan pekerjaan, jumlah responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 92 orang dengan persentase sebesar 52,6% dari jumlah keseluruhan responden, sedangkan yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 47 orang responden dengan persentase 26,8% dari jumlah keseluruhan responden, dan sisanya bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 36 orang dengan persentase sebesar 20,6% dari jumlah total responden.

B. Uji Kualitas Instrumen

1. Analisis Statistik Deskriptif

Uji analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari data penelitian. Hasil dari uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.6 dengan memperhatikan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan (X ₁)	175	12	25	19,85	2,487
Diskriminasi Perpajakan (X ₂)	175	8	20	14,45	2,092
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X ₃)	175	30	51	41,39	3,946
Ketepatan Pengalokasian Pajak (X ₄)	175	10	25	18,17	2,768
Kesadaran Perpajakan (X ₅)	175	12	23	17,77	2,137
Etika Penggelapan Pajak (Y)	175	11	23	17,65	2,564

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.6 dengan jumlah sampel 175, diperoleh hasil untuk sistem perpajakan (X₁), nilai minimum atas jawaban yang diberikan responden sebesar 12 dan 25 untuk nilai maksimumnya, sehingga diperoleh nilai rata-rata (*mean*) 19,85. Variabel diskriminasi perpajakan (X₂) memiliki nilai minimum jawaban responden sebesar 8 dan nilai maksimumnya sebesar 20 sehingga menghasilkan rata-rata (*mean*) sebesar 14,45. Variabel teknologi dan informasi perpajakan (X₃) menunjukkan nilai minimum jawaban responden sebesar 30, sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 51 sehingga diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41,39. Variabel ketepatan pengalokasian pajak (X₄) menghasilkan nilai minimum sebesar 10 dan 25 untuk nilai maksimum jawaban yang diberikan responden, sehingga dapat diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,17. Variabel kesadaran perpajakan (X₅) memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 23 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 17,77. Variabel etika

penggelapan pajak (Y), jawaban nilai minimum responden sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 23, sehingga diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,65.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas kuesioner penelitian atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh penelitian dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari sejumlah responden. Kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas. Uji validitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *Pearson Product Moment* dengan menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden.

Dasar pengambilan uji validitas *Pearson Product Moment* yaitu dengan melihat nilai signifikansi (Sig.). Item kuesioner dikatakan valid jika nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$, sebaliknya jika nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$, maka item pada kuesioner dikatakan tidak valid atau tidak lolos uji validitas. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Sig.	Ket.
Sistem Perpajakan (X ₁)	SP1	0,000	Valid
	SP2	0,000	Valid
	SP3	0,000	Valid
	SP4	0,000	Valid
	SP5	0,000	Valid
Diskriminasi Perpajakan (X ₂)	DP1	0,000	Valid
	DP2	0,000	Valid
	DP3	0,000	Valid
	DP4	0,000	Valid
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X ₃)	TI1	0,000	Valid
	TI2	0,000	Valid
	TI3	0,000	Valid
	TI4	0,000	Valid
	TI5	0,000	Valid
	TI6	0,000	Valid
	TI7	0,000	Valid
	TI8	0,000	Valid
	TI9	0,000	Valid
	TI10	0,000	Valid
	TI11	0,000	Valid
	TI12	0,000	Valid
Ketepatan Pengalokasian Pajak (X ₄)	KP1	0,000	Valid
	KP2	0,000	Valid
	KP3	0,000	Valid
	KP4	0,000	Valid
	KP5	0,000	Valid
Kesadaran Perpajakan (X ₅)	KS1	0,000	Valid
	KS2	0,000	Valid
	KS3	0,000	Valid
	KS4	0,000	Valid
	KS5	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Lanjutan Tabel 4.7

Variabel	Item Pertanyaan	Sig.	Ket.
Etika Penggelapan Pajak (Y)	EP1	0,000	Valid
	EP2	0,000	Valid
	EP3	0,000	Valid
	EP4	0,000	Valid
	EP5	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji validitas *Pearson Product Moment* pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa seluruh item-item pertanyaan dari variabel bebas yang terdiri dari sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian pajak, dan kesadaran perpajakan serta variabel terikat yaitu etika penggelapan pajak pada kuesioner penelitian memiliki nilai Sig. 0,000 yang berarti bahwa nilai Sig. $< \alpha$ (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid dan telah lulus uji validitas.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas kuesioner penelitian atau konsistensi kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari sejumlah responden. Kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti reliabilitasnya. Berbeda dengan uji validitas yang menguji masing-masing item kuesioner, pada uji reliabilitas ini dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item kuesioner variabel penelitian.

Jika variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,50-070 maka reliabilitas moderat atau cukup tinggi yang dapat dikatakan bahwa variabel penelitian mempunyai reliabilitas konsisten secara internal. Sedangkan jika variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* 0,70-0,90 maka reliabilitas tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa variabel mempunyai reliabilitas konsisten secara internal.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai kriteria	Kesimpulan
Sistem Perpajakan (X ₁)	0,791	0,70-0,90	Reliabilitas Tinggi
Diskriminnasi Perpajakan (X ₂)	0, 691	0,50-0,70	Reliabilitas Moderat (cukup tinggi)
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X ₃)	0, 607	0,50-0,70	Reliabilitas Moderat (cukup tinggi)
Ketepatan Pengalokasian Pajak (X ₄)	0,757	0,70-0,90	Reliabilitas Tinggi
Kesadaran Perpajakan (X ₅)	0, 559	0,50-0,70	Reliabilitas Moderat (cukup tinggi)
Etika Penggelapan Pajak (Y)	0,704	0,70-0,90	Reliabilitas Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Variabel sistem perpajakan memiliki nilai *Chonbach's Alpha* sebesar 0,791 yang artinya memiliki nilai *Chonbach's Alpha* antara 0,70-090 maka variabel sistem perpajakan dapat dikatakan mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi dan reliabilitas konsisten secara internal. Variabel diskriminasi perpajakan memiliki nilai *Chonbach's Alpha* antara 0,50-070 yaitu sebesar 0,691 artinya variabel diskriminasi perpajakan mempunyai

tingkat reliabilitas moderat atau cukup tinggi dan reliabilitas konsisten secara internal. Variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki nilai *Chonbach's Alpha* antara 0,50-0,70 yaitu sebesar 0,607 maka dapat dikatakan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan mempunyai tingkat reliabilitas moderat atau cukup tinggi dan reliabilitas konsisten secara internal. Variabel lain yang reliabel adalah variabel ketepatan pengalokasian pajak, dapat dilihat dari nilai *Chonbach's Alpha* antara 0,70-0,90 yaitu sebesar 0,757 yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi Serta variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai *Chonbach's Alpha* antara 0,50-0,70 yaitu sebesar 0,559 yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran memiliki reliabilitas moderat atau cukup tinggi dan variabel kesadaran memiliki reliabilitas yang konsisten secara internal. Sedangkan untuk variabel terikat yaitu etika penggelapan pajak memiliki nilai *Chonbach's Alpha* antara 0,70-0,90 yaitu sebesar 0,704 yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan lolos uji reliabilitas.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan seperti pada Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat digunakan dalam penelitian karena semua variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas dan data dari penelitian berkualitas dan konsistensi secara internal dari waktu ke waktu.

3. Uji Asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05), maka nilai residual berdistribusi secara normal, sebaliknya jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05), maka nilai residual data berdistribusi tidak normal. Pada uji normalitas ini menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^a	Mean	0
	Std. Deviation	2.52542703
Most Extreme Differences	Absolute	0.074
	Positive	0.04
	Negative	-0.074
Kolmogorov-Smirnov Z		0.984
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.288

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas yang terdapat pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,288 $>$ nilai α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada penelitian berdistribusi secara normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara residual satu ke residual pengamatan lainnya dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heterokedastisitas adalah jika p value atau nilai Sig. $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil dari pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Uji Heterokedastisitas

	Variabel	Sig.	Keterangan
1	(Constant)	0.426	
	Sistem Perpajakan (X ₁)	0.171	Bebas heterokedastisitas
	Diskriminasi Perpajakan (X ₂)	0.462	Bebas heterokedastisitas
	Teknologi dan Informasi (X ₃)	0.596	Bebas heterokedastisitas
	Ketepatan Pengalokasian Pajak (X ₄)	0.059	Bebas heterokedastisitas
	Kesadaran Perpajakan (X ₅)	0.213	Bebas heterokedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar 0,05. Nilai Sig. Sistem perpajakan sebesar $0,429 > 0,05$, Nilai Sig. variabel diskriminasi perpajakan sebesar $0,171 > 0,05$. Variabel teknologi dan informasi perpajakan mempunyai nilai Sig. $0,596 > 0,05$. Variabel ketepatan pengalokasian pajak memiliki nilai Sig. $0,059 > 0,05$. Variabel kesadaran memiliki nilai Sig. $0,213 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan

bahwa semua variabel penelitian bebas dari heterokedastisitas dan dapat digunakan dalam penelitian karena telah memenuhi prasyarat pengujian regresi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Dasar pengujian pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factors*) yaitu apabila $VIF < 10$ atau nilai $tolerance > 0,1$ maka model regresi bebas dari multikolinieritas. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Toleranc e	VIF	
1 (Constant)			
Sistem Perpajakan (X ₁)	0.971	1.03	Bebas Multikolinieritas
Diskriminasi Perpajakan (X ₂)	0.965	1.036	Bebas Multikolinieritas
Teknologi dan Informasi (X ₃)	0.916	1.091	Bebas Multikolinieritas
Ketepatan Pengalokasian Pajak (X ₄)	0.931	1.074	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran Perpajakan (X ₅)	0.992	1.008	Bebas Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak	
--	--

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel < 10 dan nilai tolerance dari masing-masing variabel $> 0,1$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 4.12, Persamaan dari regresi linear berganda dari penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 13,65 - 0,085SP + 0,035DP + 0,059TI + 0,018KP + 0,135KS + e$$

Dari persamaan regresi dapat diartikan dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 13,65 menyatakan bahwa jika variabel independen nilainya adalah 0, maka etika penggelapan pajak nilainya adalah 13,65.
- b. Koefisien regresi SP (sistem perpajakan) sebesar -0,085 dari semua faktor yang diteliti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan mempunyai pengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Sehingga hal ini menyatakan bahwa semakin rendah sistem perpajakan maka penggelapan pajak dianggap perilaku yang etis.
- c. Koefisien regresi DP (diskriminasi perpajakan) sebesar 0,035 dari semua faktor yang diteliti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel diskriminasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap etika

penggelapan pajak. sehingga hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi diskriminasi perpajakan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

- d. Koefisien regresi TI (teknologi dan informasi perpajakan) sebesar 0,059 dari semua faktor yang diteliti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. sehingga hal ini menyatakan bahwa semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang tersedia akan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
- e. Koefisien regresi KP (ketepatan pengalokasian pajak) sebesar 0,018 dari semua faktor yang diteliti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel ketepatan pengalokasian pajak perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. sehingga hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketepatan pengalokasian pajak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
- f. Koefisien regresi KS (kesadaran perpajakan) sebesar 0,135 dari semua faktor yang diteliti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. sehingga hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

2. Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Tabel 4.12
Hasil Uji Signifikansi Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.65	3.258		4.189	0
	Sistem Perpajakan (X1)	-0.085	0.079	-0.082	-1.067	0.287
	Diskriminasi Perpajakan (X2)	0.035	0.095	0.029	0.372	0.71
	Teknologi dan Informasi (X3)	0.059	0.051	0.091	1.151	0.251
	Ketepatan Pengalokasian Pajak (X4)	0.018	0.073	0.019	0.244	0.808
	Kesadaran Perpajakan (X5)	0.135	0.091	0.112	1.476	0.142
a. Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak						

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dasar pengujian pada uji t adalah dengan melihat nilai signifikansi. Syarat hipotesis dapat diterima yaitu bila nilai $\text{Sig.} < \alpha (0,05)$ dan koefisien regresi searah dengan arah hipotesis. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.12. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.12 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Hipotesis dapat diterima apabila nilai $\text{Sig.} < \alpha (0.05)$ dan koefisien regresi searah dengan arah hipotesis. Nilai signifikansi variabel

sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah 0,287 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 ditolak.

- b. Diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Nilai signifikansi variabel diskriminasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak adalah 0,71 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak.

- c. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Nilai signifikansi variabel teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah 0,251 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

- d. Ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Nilai signifikansi variabel ketepatan pengalokasian pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah 0,808 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak.

- e. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Nilai signifikansi variabel kesadaran perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah 0,142 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Dasar penilaian dalam uji F adalah bila nilai signifikansi < dari 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya. Hasil dari uji F dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Hasil Uji Signifikansi F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	34.3	5	6.86	1.045	.393 ^a

Residual	1109.73 4	169	6.566		
Total	1144.03 4	174			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel penelitian ini adalah sebesar $0,393 > 0,05$, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian pajak, dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

4. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterbatasan variabel-variabel independen model penelitian dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai semakin mendekati nol maka semakin kecil pengaruhnya, sedangkan apabila nilai mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.173 ^a	0.03	0.001	2.563

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan pada Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,001 atau sebesar 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian pajak, dan kesadaran perpajakan untuk menjelaskan variabel etika penggelapan pajak hanya sebesar 0,1%. Sedangkan sisanya sebesar 99,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan pada penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem yang telah diatur oleh Pemerintah (Dirjen Pajak) dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang merupakan suatu bentuk implementasi dari peran serta wajib pajak secara nyata dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk ikut berdistribusi langsung dalam pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan negara. Pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan seperti melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini menguji keterkaitan antara sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil

pengujian menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini searah dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan Marlina (2014), Fatimah dan Wardani (2017). Sedangkan penelitian ini tidak searah dengan hasil penelitian yang dilakukan Khan dan Prince (2014), Ardyaksa (2014), dan Silaen (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini, lebih banyak responden yang menyatakan tidak setuju melakukan penggelapan pajak meskipun sistem perpajakan yang berlaku dinilai kurang baik atau tidak dalam pelaksanaannya. Sebaik atau seburuk apapun pengelolaan uang pajak, para petugas pajak melakukan korupsi atas uang pajak, prosedur perpajakan berbelit-belit, penggelapan pajak tetap dianggap perilaku yang negatif untuk dilakukan.

Seburuk dan sebaik apapun sistem perpajakan yang digunakan, penggelapan pajak tetap dianggap sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya pendapatan pajak di KPP Pratama Sumbawa setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan pajak pada tiap tahunnya menandakan bahwa telah tercapainya optimalisasi penerimaan pajak pada daerah tersebut.

2. Diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Diskriminasi perpajakan merupakan perlakuan yang membedakan wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan dikarenakan beberapa

faktor penyebab yaitu seperti adanya perbedaan status sosial, agama, ras, dan lain sebagainya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini menguji pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun berdasarkan hasil pengujian menunjukkan hasil yang berlawanan yaitu variabel diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2014), Widjaja, dkk (2017), Fatimah dan Wardani (2017), yang menunjukkan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi menurut persepsi wajib pajak dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku etis dan sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi menurut persepsi wajib pajak dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku tidak etis. Namun penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015), Sariyani, dkk (2016), dan Fitriyanti, dkk (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil pada penelitian yang menyatakan diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dikarenakan lebih banyak responden yang menyatakan

tidak setuju melakukan penggelapan pajak meskipun telah terjadi praktik diskriminasi dalam perpajakan. Hal ini berarti setinggi apapun tingkat diskriminasi yang dilakukan, penggelapan pajak tetap dianggap sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan.

Tidak berpengaruhnya diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak tidak terlepas dari persepsi masyarakat khususnya wajib pajak yang beranggapan bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan meskipun ada atau tidak adanya diskriminasi didalamnya, terlepas dari etis atau tidaknya perilaku penggelapan pajak tersebut. Melakukan kewajiban perpajakan dianggap sebagai peran serta wajib pajak dalam membantu pertahanan dan pembangunan negara.

3. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan sebagainya yang merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknologi dan informasi memiliki pengaruh atau tidak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan hasil uji signifikansi t pada Tabel 4.12 menunjukkan nilai Sig. lebih besar dari nilai α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini searah dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014), Paramita dan Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), Silaen (2015),

Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila teknologi perpajakannya semakin baik, maka belum tentu wajib pajak akan mempersepsikan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak baik. Pernyataan ini juga didukung oleh banyaknya jawaban responden yang setuju bahwa fasilitas teknologi dan informasi semakin maju dan modern namun banyak dari responden yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut, maka dari itu perilaku penggelapan pajak yang dilakukan masih dianggap sebagai perilaku yang etis.

4. Ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Ketepatan pengalokasian pajak merupakan pemanfaatan dana pajak yang tercermin dalam pendapatan negara dan didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk ketersediaan fasilitas umum yang disediakan Pemerintah sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu wajib pajak berharap dengan patuh membayar pajak fasilitas umum akan semakin banyak tersedia. Jika fasilitas umum dinilai sudah

baik dan telah banyak tersedia, maka akan menimbulkan kepuasan tersendiri pada wajib pajak atas pembayaran pajaknya. Rasa puas terhadap pendistribusian pajak tersebut akan membuat wajib pajak enggan melakukan penggelapan pajak dan beranggapan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perbuatan yang buruk dan tidak etis.

Dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh dari ketepatan pengalokasian pajak terhadap etika penggelapan pajak. Tetapi dari hasil penelitian pada Tabel 4.12 nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan pengalokasian bukan menjadi faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk melakukan ataupun menghindari penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak terlepas dari jawaban yang diberikan oleh responden dalam penelitian ini yaitu subjek pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar, yang sebagian besar memberikan jawaban bahwa mereka setuju jika dana pajak belum didistribusikan dengan baik dan merata, adil, maupun transparan, namun penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tetaplah rendah. Hal ini terbukti dari pendapatan pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2015) dan Fitriyanti, dkk (2017), yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyksa (2014) yang menyatakan variabel ketepatan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

5. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Kesadaran perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak menyadari, mengetahui, dan memahami ketentuan dan aturan yang benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wujud kewajiban yang harus dilakukan bagi warga negara yang baik. Pada penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kesadaran perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.12, nilai Sig. lebih besar dari nilai α (0,05), yang dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2013) dan Mutiah (2014).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran perpajakan semakin meningkat belum tentu perilaku perpajakan dianggap sebagai perilaku yang tidak baik atau perilaku yang tidak etis. Hal ini terbukti dari banyaknya jawaban responden yang tidak konsisten karena disaat yang bersamaan responden setuju bahwa kewajiban membayar pajak dilakukan secara sukarela dan secara paksa. Sedangkan banyak juga responden yang berpendapat bahwa setinggi dan serendah apapun tingkat kesadaran perpajakan, penggelapan pajak tetap dianggap perbuatan yang tidak baik dan berpendapat bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis.